



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABD. JABBAR
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 55116

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.903.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah Seluas 495 m2 di SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 1926 m2 di ENREKANG, WARISAN Rp. 25.000.000
6. Tanah Seluas 215 m2 di SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000
7. Tanah Seluas 263 m2 di SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
8. Tanah Seluas 1700 m2 di PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 93.500.000
9. Tanah Seluas 6835 m2 di PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
10. Tanah Seluas 71 m2 di SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
11. Tanah Seluas 1204 m2 di PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/75 m2 di SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	207.500.000
1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA NMAX SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA AGYA AGYA 1.2 G M/ MINUBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	140.534.953
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.269.034.953
III. HUTANG	Rp.	520.167.600
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.748.867.353

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.